

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Sumber Daya Manusia

Kualitas proses dan hasil pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sumber daya manusia yang menjadi pelaku sekaligus objek pembangunan. Manusia yang dalam batasan unit daerah disebut warga, merupakan potensi elementer bagi pembangunan di daerah tersebut. Warga, yang secara kuantitatif besar, akan menjadi faktor pendorong pembangunan yang efektif jika diimbangi kualitas dan kompetensi untuk berperan secara konstruktif dalam proses pembangunan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi kualitas dan ruang yang memadai untuk berkontribusi, dapat menyebabkan problematika sosial yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tahun 2005 sampai dengan 2009 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 1,71 persen. Dilihat dari struktur umur penduduk Kota Metro tahun 2005–2009, jumlah penduduk usia produktif (≥ 15 -64 tahun) rata-rata berjumlah 88.310 jiwa atau 67,65% dari jumlah penduduk, sedangkan usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 64 tahun) rata-rata berjumlah 42.229 jiwa atau 32,35%.

Struktur umur penduduk Kota Metro termasuk katagori piramida konstruktif, yang berarti pengurangan pada kelompok umur muda dan peningkatan penduduk pada usia produktif dan terdapat penurunan pada usia tua (> 64 tahun). Konsekuensinya terjadi peningkatan kebutuhan sarana prasarana wilayah yang dibutuhkan oleh kelompok usia muda dan produktif.

Dengan struktur kependudukan tersebut, tingkat ketergantungan penduduk tidak produktif relatif tinggi terhadap penduduk yang produktif. Faktor penyebab tingginya angka usia produktif yang belum bekerja antara

lain karena terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru, terdapat usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, juga faktor banyaknya pendatang usia produktif dari luar Kota Metro sebagai pekerja tidak tetap atau pedagang musiman.

Dilihat dari penyebaran penduduk, sebagian besar masih terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat dengan rata-rata 35,76% dan Metro Timur rata-rata 22,80%. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro 1.959 jiwa/km² pada tahun 2008, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Metro Pusat (4.113 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (888 jiwa/km²). Ketersediaan sarana prasarana, serta fungsinya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan menjadikan Kecamatan Metro Pusat memiliki daya tarik lebih besar dibanding kecamatan lainnya.

Pelayanan pendidikan bagi warga Kota Metro masih perlu terus ditingkatkan pemerataan dan kualitasnya. Masih ada usia produktif yang tidak menyelesaikan sekolah dan belum bekerja, berakibat terhadap kualitas tenaga kerja yang ada. Hal ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup keluarga, sehingga tingkat konsumsi riil per kapita penduduk relatif kecil. Dampak dari itu semua tentu perlu segera ditanggulangi.

Dengan kondisi di atas, sektor pendidikan masih merupakan persoalan utama untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan kualitas pelayanan bagi seluruh warga. Hal tersebut meliputi, antara lain, sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, sistem manajemen, serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Di samping itu, keterbatasan sarana-prasarana kesehatan, juga tenaga kesehatan, akan menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Ongkos layanan kesehatan menjadi relatif mahal, sehingga masyarakat bawah akan merasakan dampak biaya tinggi untuk mendapat pelayanan kesehatan yang

memadai. Hal ini, jika tak segera diatasi, akibatnya kualitas kesehatan masyarakat dapat menurun.

4.1.2. Kondisi dan Permasalahan Bidang Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB Kota Metro Atas dasar harga berlaku selama tahun 2000 - 2009, mengalami kenaikan rata-rata cukup signifikan yakni dari Rp. 338,455 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp. 1.017,101 milyar pada tahun 2009, atau naik sebesar Rp. 678,646 milyar (200,51%).

Demikian juga dengan nilai PDRB Kota Metro Atas dasar harga konstan 2000 selama tahun 2000–2009, mengalami kenaikan sebesar Rp. 193,046 milyar (57,04%) yakni dari Rp. 338,455 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp. 531,501 milyar pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro selama periode 2000—2009 berfluktuasi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2004 (6,47%) sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah dicapai pada tahun 2001 (3,23%) yang berhubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Angka sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mencapai 5,37%. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada lapangan usaha listrik, gas dan air bersih sebesar 34,27%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 8,80%; sedangkan pertumbuhan tertinggi ketiga terjadi pada lapangan usaha pengangkutan dan transportasi yang mencapai 8,12%; sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha bangunan sebesar 2,26%.

Struktur perekonomian daerah berdasarkan sisi produksi ditentukan oleh besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian Kota Metro pada kurun waktu tahun

2000–2009 sekitar 24%-29% PDRB disumbangkan oleh sektor jasa-jasa; diikuti oleh sektor pertanian 21%-22% (periode tahun 2000-2001) yang lalu digantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15%-19% (periode tahun 2002-2003), dan selanjutnya digantikan lagi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 19%-20% (periode tahun 2004-2009).

Secara riil dimana pengaruh perubahan harga sudah dihilangkan, terlihat bahwa selama periode 2000 - 2009 Sektor Jasa-jasa memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kota Metro. Sektor kedua terbesar adalah sektor pertanian yang berlangsung antara periode 2000 – 2001. Sedangkan sejak periode 2002 sampai dengan 2009, sektor pertanian mengalami penurunan dan secara perlahan mulai tergeser oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2009 sumbangan sektor pertanian ini hanya tinggal 13,36% setelah sebelumnya pada tahun 2008 memberikan sumbangan sebesar 13,76%. Sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang pada tahun 2000 menempati urutan ketiga (21,18%) setelah sektor pertanian tetapi sejak tahun 2002 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2005 menempati urutan kedua dalam menyumbang pembentukan PDRB dan menggeser peranan sektor pertanian. Namun sejak tahun 2006 peranan sektor ini mulai tergeser oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang pada tahun 2009 memberikan sumbangan sebesar 24,05%.

Sedangkan jika struktur ekonomi Kota Metro ditinjau dari sisi pengeluaran maka kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga (60,52%); konsumsi pemerintah (30,22%); pembentukan modal tetap brutto (7,53%); konsumsi nirlaba (1,05%); serta perubahan stok (0,68%) (BPS Kota Metro, 2010).

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian daerah. Terlepas dari beberapa kelemahan yang melekat di dalamnya, pendapatan per kapita umum dipergunakan sebagai salah satu

indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, diartikan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, pendapatan per kapita dapat dihitung sebagai rasio antara Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan banyaknya penduduk.

Pendapatan per kapita masyarakat Kota Metro sampai dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan *end to end* atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Angka sementara berdasarkan harga berlaku, pendapatan per kapita pada Tahun 2009 sebesar Rp. 7,463 juta meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan lebih menunjukkan pendapatan riil per kapita yang berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) dan pada tahun 2009 mencapai Rp. 3,900 juta.

Demikian juga dengan nilai PDRB Kota Metro atas dasar harga konstan 2000 selama tahun 2005–2009, mengalami kenaikan sebesar Rp. 103,35 milyar (24,21%) yaitu dari Rp. 426,9 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 530,2 milyar tahun 2009.

Struktur perekonomian Kota Metro pada kurun waktu tahun 2005–2009 hampir 50% PDRB Kota Metro disumbangkan oleh sektor-sektor tersier yaitu sektor jasa-jasa dan sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Pada tahun 2009 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Metro adalah lapangan usaha jasa-jasa sebesar 30,09%, diikuti oleh lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 21,04% dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 14,24%.

Meski sumbangan sektor pertanian tercatat terus menurun selama 2005–2009, tetapi kecenderungan yang lazim pada wilayah yang semakin berkembang dan maju, struktur perekonomian akan banyak disokong sektor jasa dan perdagangan. Di Kota Metro, sektor pertaniannya masih perlu didukung industri pengolahan hasil-hasil pertanian, dengan dukungan

teknologi yang tepat, untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, yang selama ini masih cenderung dipasarkan dengan nilai tambah yang rendah.

Kota Metro memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perhatian terhadap sektor jasa dan perdagangan ini. Namun, upaya tersebut juga membutuhkan pemahaman yang utuh tentang kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomiannya. Pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang selama ini dilakukan dirasakan belum optimal dalam meningkatkan kapasitas dan sustainabilitas usaha. Pemberian bantuan pinjaman (modal) lunak, misalnya, cenderung belum berjalan sesuai harapan baik karena masalah perencanaan maupun teknis pelaksanaannya.

Membangun perekonomian masyarakat Kota Metro adalah memberdayakan potensi sumber daya manusia, dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas sektor UMKM serta industri kreatif rakyat, dengan berbasis pada kemampuan yang dimiliki. Masih banyaknya pengangguran perlu segera diberdayakan melalui pemberian stimulus dan akses pada permodalan, pembinaan, pemberian keterampilan kewirausahaan, dan perwujudan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut akan semakin kuat dengan upaya membuka Kota Metro sebagai daerah investasi yang menarik bagi pihak dari luar.

4.1.3. Kondisi dan Permasalahan Prasarana Dasar Wilayah

Persoalan pokok infrastruktur yang dihadapi Kota Metro berupa sarana transportasi, yaitu jalan penghubung antar seluruh kecamatan, baik di daerah pemukiman maupun pertanian, masih perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kondisi ruas jalan sebagian besar sudah berupa jalan aspal. Kondisi ini diharapkan membawa pengaruh positif terhadap kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor pendidikan, perkebunan, peternakan, dan perkembangan perkotaan secara lebih merata.

Pemenuhan kebutuhan aliran listrik belum merata dengan masih adanya jaringan yang dikelola Koperasi Listrik Pedesaan di sebagian wilayah Kota Metro. Hal ini harus disikapi untuk lebih memenuhi kebutuhan listrik warga, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai faktor produksi yang vital.

Kebutuhan akan air bersih dewasa ini juga sudah mendesak untuk disikapi secara efektif, sehingga jangan sampai warga kota kekurangan air bersih. Selama ini masyarakat hanya menggantungkan diri pada air bawah tanah (sumur) dan atau membeli yang semakin hari semakin habis dan mahal, di samping kualitasnya kurang terjamin. Oleh karena itu pembangunan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, kelistrikan, dan air bersih, serta telekomunikasi merupakan prioritas untuk terus ditingkatkan.

4.1.4. Kondisi dan Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban

Berbagai kesenjangan seperti akses terhadap fasilitas sosial-ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, kepemilikan tanah, serta potensi kerawanan sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian, kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, kemiskinan serta berbagai aspek lainnya merupakan potensi pemicu konflik yang patut diantisipasi sejak dini. Meski Kota Metro dikenal tenang dan nyaman, tetapi tindakan preventif perlu selalu dilakukan, agar berbagai gangguan yang dapat merusak keamanan dan kenyamanan kota tersebut dapat dihindari.

Penduduk usia produktif yang belum bekerja perlu disentuh program pemerintah untuk dapat mengisi waktunya secara produktif dan kreatif, sehingga tidak sampai muncul motivasi atau mudah terpancing melakukan perbuatan yang negatif. Banyaknya pendatang dari luar daerah ke Kota Metro, baik untuk sekolah, bekerja, atau berdagang, juga harus disambut dengan baik dan positif.

Rasa aman masyarakat yang sedikit terganggu akibat tindak kejahatan pencurian, perampokan dan penodongan, juga perlu disikapi dengan baik.

Untuk itu perlu kerja sama antara pemerintah, seluruh masyarakat, dan aparat kepolisian.

Kota Metro juga merupakan kota sentral dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Berkenaan dengan hal itu, maka sumber kerawanan, ketidaktertiban, dan terganggunya ketentraman warga tidak semata-mata berasal dari dalam Kota Metro, tetapi juga berkemungkinan dapat berasal dari daerah sekelilingnya.

Pada akhirnya, Pembangunan di Kota Metro secara umum masih berkuat dengan masalah pembangunan infrastruktur perkotaan. Hal ini disebabkan karena Kota Metro masih berada pada tahap menuju sistem perkotaan yang kompleks/metropolitan. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang mampu menciptakan *multiplier effect* akan menarik banyak pembangunan menuju kota metropolitan meskipun dalam hal ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan multi aspek, terutama aspek sosial budaya. Kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang terbuka bukanlah hal yang mudah meskipun secara komposisi, masyarakat Kota Metro adalah masyarakat yang multikultural.

Selain infrastruktur perkotaan, masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah Kota Metro mengingat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau industri mempersempit Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air. Meskipun dalam rencana Tata Ruang Kota Metro, wilayah kecamatan Metro Selatan ditetapkan sebagai daerah lahan pertanian produktif, namun tidak mustahil perkembangan sarana prasarana transportasi dapat mengubah tatanan yang telah dibuat itu. Dengan kondisi geografis Kota Metro, diprediksi bencana alam yang mungkin adalah bencana banjir yang berkaitan erat dengan alih fungsi lahan.

Permasalahan pembangunan di Kota Metro tidak terlepas dari isu-isu pembangunan baik di tingkat Provinsi Lampung, nasional, maupun global.

Oleh karena itu akan dibahas satu persatu isu-isu terkait yang dapat menjadi isu bersama.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Global

Lingkungan global di era abad 21 ini ditandai dengan isu *Revolusi Industri* yang dikenal dengan *Revolusi 3 T* yaitu *Transportasi, Telekomunikasi dan Turisme*. Dengan, semakin banyak dan beragam serta canggihnya sarana transportasi, telah menyebabkan semakin cepat dan mudahnya pergerakan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain; memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian informasi keseluruh pelosok dunia; serta memberikan dorongan dan rangsangan luar biasa bagi perkembangan pariwisata.

Isu global kedua lain yang menonjol pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masalah terorisme, khususnya sejak peristiwa Gedung WTC di Amerika Serikat dan peristiwa Bom Bali di Indonesia. Isu ini telah memunculkan fenomena paranoid, berupa ketakutan akan terjadinya terorisme di seluruh dunia, terutama pada dunia Muslim. Masalahnya, Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sehingga ikut terimbas dampak paranoid ini.

Pada sisi lingkungan, isu global yang telah muncul adalah adanya *Global Warming* yang mampu mengubah pola musim di seluruh dunia. Perubahan pola musim ini akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena perubahan pola musim akan mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja dan penyediaan pangan bagi manusia. Dengan demikian, isu *Global Warming* cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap perjalanan hidup bangsa Indonesia, dan Provinsi Lampung khususnya, yang masih bertumpu pada bidang pertanian.

Isu global yang lain adalah adanya krisis ekonomi global, yang dampaknya akan dapat segera terlihat dan berlangsung sampai 3-4 tahun ke

depan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa RPJMD Kota Metro 2010-2015 akan melalui suatu periode yang merupakan kurun waktu dari berlangsungnya dampak krisis global tersebut.

Berbagai isu global di atas, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh besar bagi Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Dengan demikian, antisipasi terhadap dampak yang mungkin muncul harus dilakukan melalui perencanaan yang cermat dan tepat.

4.2.2. Isu Nasional

Berbagai masalah saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia, antara lain sebagai dampak dari krisis berkepanjangan khususnya di bidang politik, pemerintahan dan keamanan, yang kemudian mendorong terjadinya reformasi pemerintahan, hukum, dan HAM. Beberapa isu pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, disintegrasi, desentralisasi dan debirokratisasi.

Reformasi ini telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional. Kemajuan yang cukup menonjol pada aspek demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum secara langsung, baik pemilihan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Masalah yang kemudian muncul ke permukaan pada aspek demokrasi adalah *demokrasi yang kebablasan*, yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa yang kerap kali disertai dengan anarkisme.

Pada sisi lain, desentralisasi sebagai salah satu kaidah dalam implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, telah memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk membangun rumah tangganya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kaidah desentralisasi ini belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki, bahkan terjadinya berbagai gejolak di beberapa daerah, yang antara lain sebagai

akibat dari belum dipahaminya UU tersebut secara utuh. Disamping itu, masih cukup banyak substansi penting dalam implementasi UU tersebut belum ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Ketidakoptimalan UU Nomor 32 tahun 2004 juga muncul karena masih adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, termasuk antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Sementara itu, konsep dan implementasi NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspadai dengan cermat, isu disintegrasi bangsa masih mungkin untuk muncul, terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Problem lain yang lebih mungkin muncul adalah isu debirokratisasi. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki birokrasi yang lamban, berbelit, dan tidak efisien. Kondisi ini dalam jangka panjang akan sangat merugikan, terutama dari iklim investasi.

Isu lain yang berkembang di Indonesia adalah adanya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan ini muncul, baik antar wilayah IBB (Indonesia Bagian Barat) dan IBT (Indonesia Bagian Timur), maupun antar daerah di dalam suatu wilayah. Isu kesenjangan pembangunan ini pada gilirannya memunculkan isu lanjutan berupa isu kemiskinan, pengangguran, dan adanya daerah tertinggal.

Selain itu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah isu lingkungan, yang ditandai dengan berbagai kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Isu lingkungan hidup akan terkait dengan isu *global warming*, sehingga memunculkan isu lanjutan berupa isu *carbon trade*, ketahanan air, serta ketahanan pangan.

4.2.3. Isu Provinsi Lampung

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Lampung. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Lampung. Berbagai isu lokal di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

A. Isu Bidang Ekonomi :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Isu pertama pada bidang ekonomi adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Secara makro, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui laju pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan PDRB. Sedangkan bagi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui pertumbuhan daya beli masyarakat seperti terdapat pada komponen Indeks Pembangunan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi lokal harus mempunyai karakteristik yang sangat spesifik agar pertumbuhan tersebut kontinyu dan langgeng. Salah satu parameter spesifikasi lokal adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kondisi lahan setempat. Berdasarkan parameter ini, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus bertumpu dan didasarkan pada kegiatan agribisnis, sesuai dengan potensi Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Provinsi Lampung, sehingga penduduk Provinsi Lampung akan mampu berperan aktif dan tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri. Meskipun demikian, sebagai bagian dari NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan adanya impor SDM yang

benar-benar dibutuhkan. Hanya saja, SDM yang masuk ke Provinsi Lampung harus memberikan *transfer of knowledge* kepada penduduk Lampung, sehingga secara bertahap kemampuan dan *skill* penduduk Lampung akan meningkat seiring dengan perjalanan waktu.

Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus memiliki karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian yang tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan bentuk perkonomian yang merupakan introduksi baru.

Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan nilai komparatif *gain* terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi nilai kompetitif lokal.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan juga memerlukan dukungan pertumbuhan dan perkembangan industri lokal yang mampu mem- perkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian produk yang dihasilkan bukan saja berupa produk setengah jadi, melainkan juga produk jadi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tantangan dalam penumbuhan ekonomi lokal adalah bagaimana meningkatkan investasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian tantangannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tercipta iklim kondusif bagi munculnya investasi baru. Kondusivitas investasi dapat terukur mulai dari rencana, pengajuan ijin investasi, sampai dengan implementasi.

Selanjutnya, investasi yang dimaksudkan adalah investasi yang sesuai dan mendukung potensi daerah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi lokomotif pergerakan perkonomian wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Investasi ini dapat berupa ekstensifikasi usaha ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, investasi dapat juga berupa

industrialisasi pada lini hulu dan hilir dari produk yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, simultan dengan karakteristik yang telah diungkapkan, maka investasi yang dimaksudkan adalah tidak bersifat kontra produktif terhadap ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian investasi yang dikembangkan tidak mematikan ekonomi yang berbasis kerakyatan, melainkan justru akan mendukung dan memperkuatnya.

Aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan investasi di Provinsi Lampung adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Efek lanjutan dari penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya penurunan angka pengangguran, dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Mempertahankan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang meliputi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah, kualitas, waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan pangan ini mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat. Dengan demikian, isu ketahanan pangan telah berkembang menjadi isu strategis.

Kebutuhan primer pangan adalah berbagai sumber karbohidrat. Meskipun demikian, agar proses kehidupan manusia dapat berjalan dengan normal dan sempurna, maka kebutuhan pangan harus diikuti dengan pemenuhan akan kebutuhan protein. Selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan berbagai kebutuhan tambahan, seperti : vitamin dan *feed additive*.

Sementara itu, kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi dan produktivitas bahan pangan. Sedangkan produksi dan produktivitas bahan pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan

sumber daya air; *input* sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang terkait dengan aspek agribisnis. Dengan demikian, Isu ketahanan pangan akan terkait dengan berbagai Isu lingkungan hidup yang lain, termasuk isu *Global Warming* dan *Carbon Trade*.

Isu ketahanan pangan pada dasarnya adalah tantangan dalam pembangunan pertanian secara luas, mulai dari aspek hulu sampai dengan aspek hilir. Tantangan terbesar adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas per satuan luas lahan pada setiap komoditas bahan pangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perluasan lahan dan ekstensifikasi akan terkendala dengan keterbatasan lahan.

Keterbatasan lahan ini, baik dari segi kesesuaian lahan maupun dari segi peruntukan lahan, memunculkan tantangan mengenai perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan swasembada pangan di Provinsi Lampung. Dengan demikian sudah saatnya untuk mempersiapkan regulasi mengenai lahan abadi pertanian.

Kendala pada ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan *input* menjadi faktor kunci dalam pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan *input*, selain diperlukan regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus pada semua *stake holder* terkait.

Masalah lain adalah bahwa ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang hanya bersumber dari bahan pangan beras. Hal ini dapat dipahami karena beras merupakan komoditas strategis, sehingga tekanan terhadap komoditas beras dari berbagai aspek semakin berat dari tahun ke tahun. Dengan demikian tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mulai dapat mendorong penganekaragaman sumber bahan pangan, terutama bahan pangan non beras.

Pada sisi lain, cara pandang terhadap penyediaan komoditas bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan juga perlu mengalami perubahan. Sebab, pada prinsipnya yang harus dibangun adalah peningkatan daya beli

masyarakat, sehingga ketika daya beli meningkat, maka dengan sendirinya ketahanan pangan akan terbangun. Peningkatan daya beli masyarakat ini hanya mungkin dilakukan dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sehingga konsep dasar pembangunan ketahanan pangan adalah pembangunan ekonomi.

3. Pengembangan Agro Industri

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Provinsi Lampung sebagai "Bumi Agribisnis", maka Isu penting yang kedua adalah pengembangan Provinsi Lampung sebagai provinsi agro industri. Hal ini dilakukan guna mendukung perkuatan ketahanan pangan yang telah berkembang menjadi isu pertama, sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah.

Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah produk industri. Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang dihasilkan merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi *trade mark* Provinsi Lampung. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk dari luar daerah.

Pada bidang perikanan komoditas yang dapat dikembangkan adalah produk ikan laut; pada bidang peternakan adalah sapi potong dan ayam potong. Pada bidang perkebunan adalah: tebu, sawit, karet, singkong, dan nanas. Sedangkan produk bidang tanaman pangan adalah jagung dan hortikultura.

Kata kunci bagi pengembangan isu agro industri adalah nilai ekonomis, kualitas produk, dan berbasis ekonomi kerakyatan. Ketiga kata kunci ini menjadi aspek pembeda dengan isu ketahanan pangan yang lebih merupakan pengembangan komoditas strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Parameter nilai ekonomis akan terkait dengan berbagai aspek lain, seperti : iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, efisiensi proses, penyerapan tenaga kerja lokal, pemasaran, serta penggunaan *input* berupa potensi dan keunggulan daerah. Sedangkan kualitas produk akan terkait dengan standar kualitas sesuai dengan target pasar nasional yang sesuai dengan situasi krisis.

Produk agro industri yang dihasilkan juga harus bertumpu kepada usaha agribisnis yang berbasiskan perekonomian rakyat. Dengan demikian produk tersebut akan mempunyai nilai kompetitif *gain* terhadap produk lain dari dalam daerah. Hal ini penting diupayakan, mengingat semakin besar nilai kompetitif *gain* sebuah produk akan menimbulkan implikasi profit yang secara ekonomis lebih besar. Akumulasi dari nilai kompetitif ini secara meluas akan menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia. Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam. Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

4. Penciptaan Lapangan Kerja

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa 64,5% merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk angkatan kerja mencapai 6,2%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) mencapai 55%, sehingga beban penduduk usia produktif Provinsi Lampung cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera diatasi. Sebab, jika persoalan penciptaan kerja ini tidak ditangani dengan seksama, maka dikhawatirkan akan memunculkan dampak lanjutan, yang imbasnya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan.

Pada sisi lain, penciptaan lapangan kerja bukan hanya persoalan ekonomi yang berdiri sendiri, namun terkait erat dengan berbagai upaya

pembangunan ekonomi lain, seperti: peningkatan peluang investasi, penegakan hukum, dunia perbankan, peningkatan kualitas SDM, serta lingkungan hidup.

Kondisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan tantangan yang tidak serta merta menjadi parameter aspek ekonomi saja. Penciptaan lapangan kerja dengan demikian merupakan *resultante* dari berbagai aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek ekonomi.

Selanjutnya, tantangan dalam pembangunan ekonomi guna penciptaan lapangan kerja adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, baik berupa potensi lahan maupun potensi produksi. Potensi lahan pada umumnya berupa lahan pertanian. Selain itu potensi produksi seperti tergambar pada struktur perekonomian pada PDRB, menunjukkan bahwa pertanian merupakan pendukung utama perekonomian di Provinsi Lampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum potensi lokal adalah bidang pertanian, sehingga perekonomian yang akan dibangun adalah ekonomi berbasis pertanian.

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diharapkan mampu melibatkan lebih banyak masyarakat, sehingga diperlukan model pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Model pendekatan yang mampu mengadopsi konsep ekonomi kerakyatan tersebut adalah konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, pengembangan UMKM adalah terkait dengan perbankan. Artinya, pada satu sisi dunia perbankan harus mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, namun pada sisi lain harus terdapat jaminan kelangsungan dunia perbankan melalui penerapan aturan baku perbankan.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja secara langsung jelas memerlukan adanya investasi baru, terutama yang bersifat *direct investment*. Dengan masuknya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja baru.

Dengan demikian diperlukan adanya suatu prakondisi yang mampu merangsang iklim investasi. Prakondisi tersebut antara lain meliputi penyiapan dan peningkatan kualitas berbagai aspek yang pada umumnya justru berada di luar ranah ekonomi, seperti: penegakan hukum, kepastian lahan, dan penyediaan SDM.

Investasi baru yang diharapkan, baik dalam skala menengah maupun skala besar, harus tetap dalam koridor kesesuaian lahan dan potensi wilayah. Dengan demikian investasi diharapkan muncul dalam bidang pertanian dalam arti luas, perdagangan, dan energi terbarukan.

Selain berkaitan dengan kesesuaian lahan, investasi baru tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh penduduk Lampung. Artinya jangan sampai terjadi investasi baru di Provinsi Lampung namun menggunakan tenaga kerja trampil dari luar Provinsi Lampung. Pada sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja.

Tantangan lain dalam penciptaan tenaga kerja adalah bagaimana proses dalam pembangunan ekonomi tetap berjalan, namun pada saat yang sama, kegiatan dan proses produksi dalam rangka penciptaan tenaga kerja tersebut tetap mampu melestarikan kondisi lingkungan hidup. Hal ini terutama dengan upaya untuk tetap menjaga dari adanya pencemaran lingkungan dan mempertahankan *cachtment area*.

5. Optimalisasi Hasil Bagi Migas

Provinsi Lampung memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi tambang migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut telah berhasil dieksploitasi. Sementara itu, peraturan perundangan menyebutkan bahwa daerah memiliki hak untuk ikut mengelola dan memperoleh hasil 10% (sepuluh persen) dari total penambangan migas. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul Isu mengenai perlunya optimalisasi hasil bagi tambang migas.

Hasil bagi migas ini akan dapat dipergunakan sebagai PAD dan pada akhirnya dapat dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang memerlukan perhatian adalah bentuk peran serta Provinsi Lampung dalam optimalisasi hasil bagi migas tersebut. Masalah ini memunculkan berbagai alternatif bentuk kerja sama dengan pihak penambang, sehingga perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga menghasilkan *win-win solution*.

B. Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

1. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 di Provinsi Lampung terdapat 785.041 RTM. Jika keluarga di Provinsi Lampung mencapai mencapai 1.840.931 KK, maka penduduk miskin tersebut secara statistik mencapai 42,6% dari total KK yang ada di Provinsi Lampung. Penduduk miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di daerah Desa Tertinggal (DT). Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765 desa.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian sinergi dari semua *stake holder* merupakan kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini.

Faktor penting yang menjadi perhatian adalah bahwa kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan *side effect* dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. *Side effect* tersebut antara lain berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka *drop out* sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis.

Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari

aspek ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan. Dengan demikian pendekatan melalui satu sisi, dari aspek ekonomi saja misalnya, secara keseluruhan akan memberikan akibat yang kontra produktif bagi kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Penanganan terhadap masalah kemiskinan dapat dihadapi secara langsung maupun tidak langsung. Pengentasan kemiskinan secara tidak langsung dimulai dengan berbagai program pembangunan ekonomi, seperti melalui pembukaan investasi baru, terutama yang berupa *direct investment*. Dengan berjalannya ekonomi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja baru, sehingga pengangguran akan dapat dikurangi dan pada akhirnya ekonomi akan bertumbuh.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan lanjutan secara *multiplier effect*, termasuk peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan melibatkan semua aspek kehidupan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan secara langsung dilakukan dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal (DT) secara langsung. Program ini dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-benar sudah sangat membutuhkan bantuan, sehingga harus sangat selektif. Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui berbagai program khusus, telah ditangani sebanyak 200 DT, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing akan ditangani 300 dan 265 DT.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek *stake holder* yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan.

2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Seluruh upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Provinsi Lampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melayani kebutuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sehingga semua persoalan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor sangat penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pengendalian jumlah penduduk memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara keseluruhan. Pada sisi lain, pengendalian jumlah penduduk memerlukan revitalisasi dari institusi Badan Koordinasi Kependudukan Nasional di Provinsi Lampung, sehingga fungsi koordinasi serta penyediaan SDM dan sarana prasarana dalam pengendalian jumlah penduduk menjadi lebih tertata.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Lampung menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan.

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain, tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar menumpuk di daerah perkotaan. Dengan demikian, tantangan yang muncul adalah bagaimana memberikan rangsangan bagi lulusan tenaga kependidikan untuk bersedia bekerja di daerah terpencil.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu memberikan "*life skill*" kepada peserta didik. Dengan demikian diharapkan lulusan pendidikan di Provinsi Lampung tidak selalu terjebak menjadi barisan pencari kerja dan akan mampu mandiri, sehingga secara tidak langsung akan mampu menurunkan angka pencari kerja.

Selain itu juga perlu dikembangkan materi pendidikan yang mampu mengadopsi "*local wisdom*". Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan pendidikan di Provinsi Lampung akan mampu hidup mandiri dengan mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sendiri.

Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan pergerakan masyarakat antarwilayah, bahkan antarnegara, secara sangat cepat. Kondisi ini memerlukan SDM dengan kualitas berstandar internasional. Dengan demikian diperlukan adanya suatu institusi pendidikan berstandar internasional, sehingga mampu mempersiapkan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Era globalisasi juga memerlukan SDM dengan kemampuan spesifik dan khusus pada bidang tertentu. Dengan demikian, model pendidikan yang

dikembangkan, selain berstandar internasional juga mempunyai karakteristik khusus atau bersifat kejuruan.

4. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu; adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan operasionalisasi Puskesmas Keliling.

Selain itu, juga perlu dikembangkan berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin. Salah satu konsep yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pada bidang kesehatan juga meliputi upaya pencegahan dari penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA serta berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di persimpangan antara pulau Jawa dan Sumatra, sehingga mobilitas barang dan manusia sebagai vektor penyakit menjadi sangat tinggi.

5. Penanganan Dampak Krisis Global

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak pernah diprediksikan oleh siapapun dan imbas dari krisis tersebut telah melanda ke seluruh dunia. Dampak yang kemudian muncul adalah timbulnya kelesuan ekonomi, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Dampak krisis global ini akan mulai terlihat pada awal tahun 2009 dan diperkirakan akan berlangsung selama 3-4 tahun ke depan. Akibatnya, RPJMD II Provinsi Lampung akan melalui suatu periode yang merupakan efek

dari sebuah krisis global. Berkaitan dengan hal ini, maka Isu penanganan dampak krisis global mau tidak mau telah berkembang menjadi Isu lokal.

Implikasi dari adanya krisis global adalah terjadinya berbagai pemutusan hubungan kerja, sehingga akan menghasilkan pengangguran baru. Di Indonesia diperkirakan akan muncul lebih dari 1 juta orang penganggur baru. Penganggur baru ini secara langsung akan menambah beban bagi pemerintah yang telah cukup banyak memiliki beban tanggungan penganggur.

Peningkatan jumlah penganggur ini memerlukan antisipasi, solusi, dan perencanaan program penanganan yang lebih baik agar tidak memunculkan berbagai dampak ikutan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penganggur. Berkaitan dengan hal ini maka perlu dikembangkan berbagai program yang berorientasi ke rakyat kecil dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Efek lain dari terjadinya krisis global adalah terhentinya pasar ekspor. Hal ini berarti bahwa berbagai komoditas dari Provinsi Lampung yang berorientasi ekspor akan mengalami hambatan dan kemunduran. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan pasar domestik dengan skala nasional.

6. Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata

Salah satu isu global penting saat ini adalah *Revolusi 3T*. Isu ini mengakibatkan adanya mobilitas manusia yang sangat cepat dan tidak terbatas. Salah satu akibat positif yang terjadi adalah berkembangnya industri pariwisata di seluruh dunia. Berkaitan dengan Isu global yang telah mengakibatkan berkembangnya industri pariwisata di atas, maka Provinsi Lampung harus memposisikan diri untuk mengambil peran dan kesempatan, sehingga dapat memperoleh *benefit* guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini dimungkinkan karena secara alami Provinsi Lampung memiliki SDA yang

layak untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya daerah. Dengan demikian, kedua kepentingan ini, telah melahirkan Isu berupa pentingnya pengembangan budaya daerah dan pariwisata.

Barangkali masalah yang memerlukan pertimbangan dan perhatian adalah upaya untuk menjaga supaya pengembangan pariwisata dan budaya tidak menjadi bumerang yang justru mengakibatkan degradasi budaya lokal. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu kearifan sehingga pengembangan pariwisata justru akan mengembangkan dan memperkuat budaya lokal.

C. Isu Bidang Infrastruktur

1. Pengembangan Infrastruktur

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara peran pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pengairan, namun infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi: pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik

maupun non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi Isu pengembangan infrastruktur adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya *inherent* dengan penyebaran pembangunan infrastruktur, maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya pembangunan infrastruktur mempunyai kerangka berpikir yang bersifat *long term*, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan; sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan tidak *well program*. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk mulai merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus monumental.

Berbagai infrastruktur visioner, fungsional, sekaligus monumental yang mulai dapat dikembangkan antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS); Jalan Toll Bakaheuni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Internasional Panjang; Bandara Inten II, Kota Baru Lampung; serta pengembangan jalur akses utama utara-selatan.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Provinsi Lampung mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu dikembangkan alternatif pendanaan, seperti : merancang

skala prioritas; merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara akurat dan konsisten.

2. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Provinsi Lampung secara “*given*” berada pada daerah rawan bencana alam, sehingga Isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Provinsi Lampung untuk mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh, komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek *hard ware* maupun *soft ware* dalam penanganan bencana. Aspek *hard ware* akan terkait dengan penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek *soft ware* akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM dalam penanganan bencana.

Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana. Dengan demikian pendampingan masyarakat akan situasi riil yang terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di daerah rawan bencana menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikkan.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang

disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit HIV/AIDS dan Flu Burung.

D. Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

1. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan setiap daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan daerahnya sendiri. Dalam hal ini termasuk pengembangan daerah dalam pengertian untuk melaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pada satu sisi, setiap daerah sesuai dengan UU, mempunyai kewenangan untuk memekarkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Namun pada sisi lain, pemekaran tersebut mempunyai berbagai implikasi, baik secara politis, ekonomis, maupun kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemekaran wilayah jika tidak dikelola dengan baik justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah yang telah dimekarkan.

Berkaitan kontradiksi ini maka muncul Isu pentingnya pengelolaan dan penanganan pemekaran wilayah dengan cermat dan terprogram. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah harus berada pada suatu kondisi keseimbangan optimal antara kebutuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada tahap selanjutnya fokus kegiatan lebih diarahkan kepada konteks pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB).

2. Optimalisasi Keunggulan Wilayah

Perubahan paradigma pembangunan yang lebih bertumpu pada aspek kewilayahan memungkinkan Provinsi Lampung untuk dapat berperan lebih baik. Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatra mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan karena menjadi titik penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Posisi wilayah

Provinsi Lampung memungkinkan untuk menjadi titik tumpu dari 8 provinsi yang berada di Pulau Sumatra sebelum mencapai Pulau Jawa. Sebaliknya, posisi ini juga menjadi titik masuk dari 6 provinsi di Pulau Jawa sebelum masuk ke Pulau Sumatra.

Posisi geografis Provinsi Lampung dengan demikian menjadi sangat strategis dan secara langsung membentuk suatu keunggulan wilayah. Berkaitan dengan posisi geografis ini, maka muncul isu tentang pentingnya optimalisasi keunggulan wilayah yang secara geografis dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Keunggulan wilayah ini juga telah diamati oleh Pemerintah Pusat, sehingga muncul beberapa program berskala nasional di Provinsi Lampung. Beberapa program nasional yang memanfaatkan keunggulan wilayah Provinsi Lampung antara lain: pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Pelabuhan Internasional di Panjang; jalan toll; serta pembukaan jalur utara-selatan di kawasan bagian timur Provinsi Lampung.

3. Pengembangan Kawasan Strategis

Undang Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang Undang No 32 tahun 2004 telah mengamanatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang kepada setiap daerah.

Provinsi Lampung telah menyusun tata ruang dalam bentuk Rencana Struktur Tata Ruang (RSTR) Provinsi Lampung yang kemudian pada tahun 1998 telah direvisi menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRW tersebut selanjutnya mendapatkan *legal aspect* dengan ditetapkannya Perda No 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi tahun 2001-2015.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah merevisi kembali RTRW Provinsi Lampung sejak TA 2006 dan telah difinalisasi pada tahun

2009. Dengan demikian, RTRW Provinsi Lampung yang telah direvisi akan digunakan sebagai acuan untuk RPJM 2010-2014.

RTRWP ini merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor agar dapat berkelanjutan. RTRW Provinsi Lampung sendiri berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten di dalam provinsi sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan struktur dan pola tata ruang wilayah.

Dengan adanya RTRWP yang telah direvisi dan menjadi salah satu dasar bagi penyusunan RPJMD II, maka telah memunculkan Isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai kawasan strategis. Berdasarkan RTRWP yang telah direvisi maka dapat dikembangkan berbagai kawasan strategis untuk tujuan tertentu. Dengan adanya perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis untuk tujuan tertentu yang baik akan mampu mengakomodasi dan memungkinkan untuk mengendalikan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

E. Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1. Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA telah menjadi topik yang berkembang selama dekade terakhir. Isu ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara normal. Isu kerusakan lingkungan dan SDA juga telah memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem

secara lebih luas. Kerusakan lingkungan tidak terbatas pada wilayah maupun matra, sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan.

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan kehidupan manusia secara umum. Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Penurunan produktivitas juga dapat terjadi pada manusia sendiri sebagai akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan lingkungan tempat manusia hidup.

Berkaitan dengan hal ini maka pengelolaan lingkungan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada produk semata, namun juga harus memperhatikan masyarakat yang berusaha dan berada di sekitar/dalam lingkungan, sehingga diperlukan pelibatan secara aktif masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

2. Antisipasi Krisis Air

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penurunan luas kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat, yakni mencapai $\pm 65\%$, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi Lampung hanya tinggal $\pm 30\%$ dari luas daratan Provinsi Lampung. Kenyataan ini telah memunculkan pentingnya isu kerusakan lingkungan dan SDA.

Meskipun secara status hukum kawasan hutan Lampung masih cukup luas, namun adanya kerusakan menyebabkan fungsi hutan secara ekologis tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan semakin luasnya lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pada saat ini diperkirakan luas lahan kritis Provinsi Lampung 768.284,94 Ha.

Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai *catchment area*, yakni sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan

lahan kritis akan menyebabkan daya ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah. Dengan demikian, kerusakan hutan telah memunculkan isu krisis air.

Krisis air ini menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat perekonomian di Provinsi Lampung sangat bertumpu pada pertanian dan agribisnis. Ancaman Isu krisis air ini secara langsung akan sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian dan agribisnis di Provinsi Lampung. Hal ini berarti krisis air telah menjadi isu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan penduduk di Provinsi Lampung.

3. Antisipasi *Global Warming*

Global Warming telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini berkembang sedemikian cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena pengaruhnya yang sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. *Global Warming* telah memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis secara keseluruhan.

Pada saat ini Provinsi Lampung telah mencanangkan diri sebagai provinsi agribisnis, sehingga berbagai isu yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan agribisnis secara langsung juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung. Dengan demikian, mau tidak mau, isu *Global Warming* juga telah berkembang menjadi isu lokal.

Berkaitan dengan isu *Global Warming*, maka Provinsi Lampung harus mampu mengoptimalkan potensi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia guna meningkatkan posisi tawar. Selanjutnya posisi tawar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi tawar ini dimungkinkan melalui pengembangan hutan sebagai bahan dalam *carbon trade*.

Pada sisi lain, isu *Global Warming* juga mengharuskan pengelolaan sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini perlu dilakukan mengingat

Global Warming memungkinkan terjadinya banjir dan kekeringan dalam kondisi kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

4. Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang, sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari karbon.

Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan bahan bakar. Salah satu penyebabnya adalah belum siapnya sarana pendukung seperti tabung gas. Selain itu masyarakat secara psikologis juga belum siap karena kurangnya sosialisasi tentang penghematan energi.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana mengupayakan penyediaan *bio fuel* sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon secara efisien dan murah. Hal ini perlu dilakukan mengingat meskipun Provinsi Lampung menyediakan bahan dasar bagi pengembangan *bio fuel* seperti singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan *bio fuel* di Provinsi Lampung.

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana menjaga titik keseimbangan antara penyediaan bahan mentah untuk kebutuhan *bio fuel* dengan untuk kebutuhan konsumsi. Dengan demikian harus terdapat *blocking* wilayah tanam dan pengaturan sumber bahan mentah sehingga tidak terjadi kerawanan pangan sebagai akibat pengalihan bahan pangan menjadi energi.

Energi alternatif terbarukan juga sangat dimungkinkan dari eksploitasi terhadap energi yang berasal dari panas bumi. Provinsi Lampung memiliki cadangan energi panas bumi yang sudah menjadi perhatian nasional, yakni di Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya potensi bahan dasar *bio fuel* yang melimpah dan cadangan panas bumi yang dimiliki, maka terbuka kemungkinan untuk mengembangkan Provinsi Lampung sebagai lumbung energi alternatif terbarukan. Dengan demikian dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, guna mengoptimalkan berbagai sumber energi alternatif terbarukan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun nasional.

F. Isu Bidang Politik dan Keamanan

1. Peningkatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan

Desentralisasi sebagai implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep desentralisasi ini belum berjalan dengan optimal.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakefektifan konsep desentralisasi ini. Salah satu penyebab utama adalah belum dipahaminya jiwa dari UU tersebut secara utuh. Selain itu, penerbitan UU tersebut belum diikuti dan ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Persoalan juga muncul ketika persepsi mengenai UU Nomor 32 tahun 2004 antara *stakeholder* masih belum sama. Perbedaan persepsi bukan hanya muncul antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun juga terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketidaksamaan persepsi terutama muncul pada pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing *stakeholder*.

Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan, maka timbul Isu mengenai pentingnya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar *stakeholder* pada setiap lini pemerintahan. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik akan menghasilkan sebuah sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi *over lapping* maupun *double funding*.

Selanjutnya, peningkatan sinkronisasi dan koordinasi juga akan mampu meningkatkan efisiensi sumber daya, baik berupa SDA maupun SDM. Selain itu, isu sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat relevan ketika paradigma pembangunan dalam RPJM II adalah bertumpu kepada aspek kewilayahan.

2. Pengembangan Jaminan Sosial

Berbagai krisis yang melanda Indonesia sejak 1998 dan kemudian diikuti dengan krisis global tahun 2008 telah melahirkan kelompok masyarakat yang termarginalkan dan tertinggal. Betapapun, kelompok masyarakat ini tidak dapat ditinggalkan dan memerlukan penanganan secara serius dan manusiawi. Pengelolaan yang salah, baik secara konseptual maupun penanganan terhadap kelompok masyarakat, ini akan justru menimbulkan berbagai masalah lain.

Upaya pemberdayaan pada kelompok masyarakat tertinggal ini, tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan proses pendampingan dan penyapihan secara kontinyu dan berkesinambungan. Kondisi ini memunculkan pentingnya isu pengembangan berbagai Jaminan Sosial (Jamsos), khususnya bagi kelompok masyarakat tertinggal.

Pengembangan Jamsos dapat dilakukan pada berbagai bidang dan sektor kehidupan. Pengembangan program JPS terutama dimaksudkan sebagai *buffer* yang mampu meredam terhadap berbagai guncangan dan krisis yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah susulan. Dengan demikian pengembangan program Jamsos akan berbeda dengan pengembangan ekonomi produktif pada kelompok masyarakat lain yang lebih berdaya.

4.2.3. Isu Strategis Kota Metro

Berbagai isu nasional dan provinsi Lampung, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Kota Metro. Berbagai isu pembangunan di Kota Metro, adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Sejalan dengan hal diatas, pada tahun 2010, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro sebesar 76,03, yang meliputi Indeks Kelangsungan Hidup sebesar 79,08, Indeks Pengetahuan sebesar 86,74 dan Indeks Daya Beli sebesar 62,27. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Metro relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Lampung, hal ini tentunya merupakan salah satu tantangan untuk lebih ditingkatkan lagi kualitas sumber daya manusia di Kota Metro sehingga dapat sejajar dengan daerah lain yang lebih maju secara nasional. Dengan demikian maka, isu Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dikedepankan, dalam rangka melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan unggul. Hal ini tentunya dapat dilaksanakan melalui Pendidikan yang berdimensi akal (intelektual) dan rohani (moral/budi pekerti), yang mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal, baik dalam hal sistem pembelajaran, fasilitas sarana-prasarana, maupun iklim yang kondusif untuk proses pembelajaran masyarakat

2. Budaya Masyarakat

Isu lain yang berkembang adalah bagaimana membudayakan perilaku masyarakat Kota Metro untuk membudayakan belajar, berperilaku hidup sehat dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan belajar dan pengamalan agama menjadi sangat bermanfaat sehingga benar-benar menjadi karakter masyarakat Kota Metro yang berbudaya belajar.

Sesuatu telah dianggap membudaya, manakala di antaranya, para pelakunya merasakan senang menjalankannya, bahkan ada sesuatu yang kurang, jika tidak dijalankan.

Budaya belajar dan budaya ilmu, harus terus dikembangkan di Kota Metro. Jika membaca sudah menjadi budaya bagi sebuah masyarakat, maka mereka akan merasa kecewa ketika sehari saja tidak membaca buku atau koran tidak terbit atau bahkan jika hanya koran datang terlambat.

Jika budaya ilmu sudah menjadi budaya bagi sebuah masyarakat, maka yang terjadi adalah sekolah bukan hanya sebatas menyenangkan untuk memiliki ijazah tapi sudah pada tingkat menyenangkan ilmunya. Tatkala siswa dianggap belum mendapatkan pengetahuan yang memadai, mereka tidak merasa kecewa untuk mengulang dan akan menambah waktunya untuk belajar lagi. Dengan demikian sekolah formal bukan hanya sebatas formalitas sehingga akan melahirkan masyarakat yang diakui keilmuannya secara luas.

3. Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan

Isu ketersediaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan dan keagamaan di Kota Metro, masih merupakan isu yang perlu dikedepankan, walaupun disisi lain mengenai kultur masyarakat, kondusifitas suasana belajar mengajar, prestasi dan mutu pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan, angka usia harapan hidup, tingkat derajat kesehatan masyarakat, keharmonisan dalam menjalankan agama, kesemuanya itu mampu bersaing dengan daerah lain yang ada di Provinsi Lampung.

Sejalan dengan hal diatas, maka penyediaan, peningkatan dan pemerataan kualitas perangkat/fasilitas yang menunjang iklim dan budaya belajar masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan akses kesehatan serta peningkatan kualitas dan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam membangun budaya dan moralitas warga menjadi hal penting untuk diprioritaskan.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan problem universal akibat sistem ekonomi yang tidak mengindahkan asas keadilan dan pemerataan. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menyediakan dan menciptakan lapangan pekerjaan, juga pemerataan kualitas pendidikan dan keterampilan.

Masalah kemiskinan juga bersifat spesifik. Maka, mengatasinya pun harus dengan memahami problematika khas yang dihadapi warga miskin di setiap daerah. Namun, mata rantai kemiskinan secara umum adalah: minimnya pendidikan dan keterampilan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja baru yang tidak mampu mengimbangi cepatnya pertumbuhan angkatan kerja, sulitnya akses permodalan bagi usaha kecil, serta sulitnya warga memanfaatkan dan mengembangkan potensi dirinya menjadi aset usaha yang kreatif dan produktif karena berbagai faktor lingkungan yang memengaruhinya.

Di Kota Metro pada Tahun 2007 terdapat *7.419 rumah tangga miskin (RTM)* yang terdapat di Kecamatan Metro Selatan sebanyak 701 RTM; Kecamatan Metro Barat sebanyak 1181 RTM; Kecamatan Metro Timur sebanyak 1530 RTM; Kecamatan Metro Utara sebanyak 853 RTM dan Kecamatan Metro Pusat sebanyak 3154 RTM. Secara umum letak Rumah Tangga Miskin adalah tersebar dan tidak mengelompok (BPS, Kota Metro 2007)

Di Kota Metro pada Tahun 2009 terdapat *6.141 rumah tangga miskin (RTM)* yang terdapat di Kecamatan Metro Selatan sebanyak 578 RTM; Kecamatan Metro Barat sebanyak 884 RTM; Kecamatan Metro Timur sebanyak 1.095 RTM; Kecamatan Metro Utara sebanyak 821 RTM dan Kecamatan Metro Pusat sebanyak 2.763 RTM. Secara umum letak Rumah Tangga Miskin adalah tersebar dan tidak mengelompok. (BPS, Kota Metro 2009)

Jika melihat angka tersebut terjadi penurunan angka kemiskinan dari 7.419 RTM (Tahun 2007) menjadi 6.141 RTM (Tahun 2009) atau sebesar 1278 RTM (17.22 %).

Untuk mengatasi kemiskinan yang masih ada tersebut perlu diupayakan dengan pendekatan yang efektif, efisien dan kreatif serta berbasis pada potensi lokal dan berpihak pada pemberdayaan warga. Pemerintah Daerah tidak boleh merasa cukup dengan mengadopsi program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, melainkan harus menciptakan program-program terpadu, tepat sasaran sesuai karakteristik kebutuhan warga setempat.

5. Iklim Usaha

Tantangan saat ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kreatifitas warga, baik berupa potensi lahan, bahan baku, proses produksi, sampai dengan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya kegiatan usaha, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil.

Iklim usaha erat kaitannya dengan kondisi makro ekonomi, disamping itu juga dipengaruhi oleh kondisi kehidupan hukum-sosial-politik di daerah. Penegakan hukum menjadi faktor penting dalam investasi. Begitu juga adanya kondisi sosial yang kondusif dan harmonis, serta situasi perpolitikan yang baik merupakan faktor pengungkit suatu investasi. Selain itu, ketersediaan sarana-prasarana (infrastruktur) kota, sumber energi (listrik, dan air bersih), juga sistem perizinan yang transparan cepat dan akurat menjadi penting untuk diperhatikan terutama dalam pengembangan investasi.

Iklim usaha di Kota Metro saat ini cukup baik, namun berbagai regulasi dalam proses perijinan masih perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan, persaingan usaha (Monopoli) hampir tidak ada, masih perlu peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa harus ditingkatkan secara periodik, dukungan Perbankan (22 Bank) dan Lembaga Keuangan

Mikro (171 unit LKM) cukup tersedia namun perlu diupayakan para pengusaha/wirausahawan kota Metro mendapat akses langsung ke Lembaga tersebut.

Oleh karena itu, pengembangan iklim usaha perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga model pembangunan ekonomi dan investasi yang dikembangkan adalah pengembangan ekonomi dan investasi yang berbasis kerakyatan, di mana memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuhnya usaha produktif rakyat, memberikan insentif-disinsentif secara tepat dan proporsional, serta memberikan tempat yang layak bagi tumbuh-kembangnya kreatifitas warga untuk memproduksi. Iklim usaha merupakan prakondisi untuk teratasinya masalah pengangguran dan kemiskinan.

6. Ketenagakerjaan

Dari jumlah penduduk Kota Metro sekitar 136 ribu jiwa lebih, komposisi penduduk 34,57 % merupakan angkatan kerja. Angka pengangguran untuk angkatan kerja mencapai 51 %. Sementara, Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) mencapai 47,81 %, sehingga beban penduduk usia produktif di Kota Metro masih cukup tinggi.

Data tersebut menunjukkan, bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan isu penting yang harus segera diatasi.

Mengatasi pengangguran bukan merupakan persoalan ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti: peningkatan peluang investasi, penumbuhan sektor perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif, pemerataan kualitas pendidikan dan keterampilan, akses permodalan (Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank), penegakan hukum, dan kualitas lingkungan hidup. Dengan kata lain, penciptaan lapangan kerja merupakan resultante dari berbagai aspek pembangunan lainnya secara langsung maupun tidak langsung.

7. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan tuntutan perkembangan dunia di abad ke-21 ini. Di beberapa negara, ekonomi kreatif berperan signifikan. ekonomi

kreatif diartikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), budaya, dan warisan budaya maupun lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Sedangkan Industri kreatif adalah berbasis kreativitas, keterampilan, dan talenta yang memiliki potensi peningkatan kesejahteraan serta penciptaan lapangan kerja dengan menciptakan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Ekonomi kreatif punyai 14 subsektor industri, yaitu periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan/percetakan, *software*, televisi/radio (*broadcasting*), dan riset & pengembangan (R&D).

Di Indonesia, ekonomi kreatif berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hanya, ia belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah. Ini karena pemerintah belum menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Pemerintah masih fokus pada sektor manufaktur, fiskal, dan agrobisnis.

Di Kota Metro ekonomi kreatif dan industri kreatif masih belum tersentuh dan tertangani secara optimal padahal potensi ekonomi kreatif dan industri kreatif cukup besar untuk mendongkrak PDRB per kapita. Jumlah Industri di Kota Metro pada tahun 2010 sebesar 785 unit usaha dengan serapan tenaga kerja 2.167 orang. Adapun rinciannya terdiri dari Industri Pangan 394 Unit, Tenaga Kerja 1,170, Industri Sandang dan Kulit 92 Unit, Tenaga Kerja 204 orang, Industri Kimia dan Bahan Bangunan 124 Unit, Tenaga Kerja 375 orang Industri Logam dan Jasa 133 Unit, Tenaga Kerja 340 orang, Industri Kerajinan Umum 42 Unit, Tenaga Kerja 78 orang.

Dari data tersebut terlihat ada potensi kurang lebih 22 industri kreatif yang mendapat perhatian untuk di petakan dan dikembangkan. Adapun proyeksi sampai pada tahun 2015 mencapai 75 unit atau rata-rata 10 unit/tahun.

Dengan menggenjot perkembangan industri kreatif di Kota Metro, banyak manfaat yang bisa diraih: *Pertama*, bisnis UKM makin berkembang—sebagian besar UKM bergerak di industri kreatif. Pengembangan UKM masih menghadapi berapa masalah, seperti pemasaran, promosi, manajerial, informasi, SDM, teknologi, desain, jejaring (*networking*), dan pembiayaan yang diharapkan dapat segera teratasi.

8. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penggunaan lahan di sempadan sungai untuk pemukiman sehingga munculnya lingkungan kumuh yang menyebabkan degradasi kualitas lingkungan di sekitar sungai dan penurunan tingkat kesehatan masyarakat yang mengakibatkan pencemaran sungai yang disebabkan dari pembuangan sampah rumah tangga yang terdapat di sekitar sempadan sungai.

Persoalannya lainnya berupa pembangunan tempat tinggal dan berbagai usaha masyarakat pada sekitar saluran irigasi dan sempadan sungai/anak sungai yang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana permukiman secara memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Jaringan drainase yang kurang memadai dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga pada beberapa kawasan permukiman terjadi genangan air dan banjir pada saat musim hujan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan dan kegiatan perkotaan lainnya yang tidak diimbangi dengan penghijauan dan penegakkan regulasi mengakibatkan semakin meningkatnya pencemaran udara.

Fakta lain adalah masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar lingkungan senantiasa bersih, sehat dan indah serta terhindar dari bencana banjir dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

9. Penyediaan Fasilitas Perkotaan dan Pemanfaatan Ruang

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sarana prasarana transportasi, permukiman dan perumahan, maupun utilitas/infrastruktur kota serta aktivitas pembangunan tata ruang kota.

Kuantitas dan Kualitas ruang Publik, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sarana prasarana permukiman dan perumahan, maupun utilitas/infrastruktur kota belum optimal dengan nilai investasi yang masih rendah. Sehingga perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik. Demikian pula, penyediaan air bersih, sarana penerangan jalan umum, perparkiran, ruang terbuka hijau, ruang pejalan kaki, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, serta sarana prasarana kota lainnya masih terbatas.

Permasalahan utama jaringan transportasi di Kota Metro saat ini adalah belum tersedianya ruas jalan lingkar kota (ring road) untuk dilalui oleh kendaraan bertonase besar yang mengakses Kota Metro dari/ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan atau Bandar Lampung. Kendaraan-kendaraan besar ini melintasi ruas-ruas jalan dalam kota dan kawasan permukiman yang menimbulkan kerusakan pada badan jalan dan jembatan karena tidak mampu menampung beban kendaraan berat.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan sarana prasarana terminal, halte umum, fasilitas pejalan kaki, dan rambu-rambu lalu lintas yang masih terbatas.

Pada saat ini tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas dalam wilayah Kota Metro, namun bila sarana prasarana lalu lintas dan sistem jaringan jalan yang ada tidak ditata dengan baik maka diprediksikan dalam waktu 5-10 tahun ke depan akan terjadi gangguan lalu lintas berupa kemacetan jalan raya. Lebih-lebih karena system jaringan jalan yang ada saat ini berpola radial yang hampir seluruhnya mengakses ke wilayah pusat kota. Isu

pembangunan bidang transportasi juga perlu dikaitkan dengan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Pelayanan angkutan umum yang belum melayani sampai ke daerah pinggiran terutama di daerah yang terdapat sekolah-sekolah serta belum adanya angkutan umum pada malam hari.

Perbedaan kondisi fisik wilayah, akses transportasi, sarana prasarana pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat antara wilayah pusat dan pinggiran kota berdampak pada meningkatnya konsentrasi penduduk pada kawasan pusat kota. Kawasan pusat kota (central business district/CBD) yang berada di Kecamatan Metro Pusat relatif lebih maju dan berkembang dibandingkan pinggiran (*periphery*) kota.

Pembangunan untuk kegiatan komersial, seperti gudang, rumah walet banyak yang menyalahi lokasi peruntukannya, Selain itu juga izin yang seharusnya untuk permukiman tetapi dimanfaatkan untuk gudang dan rumah walet.

Banyak terdapat bangunan yang melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan), GSS (Garis Sempadan Sungai) dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan).

Perlu adanya penataan dan pengaturan taman kota dan ruang santai untuk masyarakat yang kurang tertata dengan baik.

10. Pelayanan Publik dan Keuangan Daerah

Untuk dapat mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good Governace*), berbagai isu strategis dan permasalahan dalam kerangka otonomi daerah adalah:

a. Isu Pelayanan Publik

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintahan diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*.

Dalam paradigma *good governance*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau Negara saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen. Kondisi ini dapat terwujud apabila pemerintah didekatkan dengan yang dilayani. Pemerintah yang didekatkan dengan yang dilayani ini berarti desentralisasi dan otonomi daerah.

Mengacu pada tujuan UU No 32/2004, Bagian Menimbang huruf a, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan desentralisasi adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, masyarakat menjadi semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka menjadi lebih kritis dalam mengajukan tuntutan dan aspirasinya kepada pemerintah. Oleh karena itu birokrasi publik dituntut untuk dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, maka permasalahan yang harus dapat dipecahkan secara prioritas antara lain :

- 1) Penguatan kelembagaan demi mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dimana akibat perubahan peraturan perundangan tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah daerah yang terjadi dalam waktu yang relative singkat mengakibatkan permasalahan bagi daerah dalam penerapannya, sehingga kelembagaan

pemerintah daerah belum dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

2) Permasalahan terkait dengan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa isu, yakni:

a). Formasi

- Penentuan formasi pegawai dan jabatan struktural belum menggunakan standar yang jelas dan baku
- Adanya beberapa perbedaan pengaturan antara UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 43/ 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

b). Pola Karir

- Masih banyak penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan karena masalah keterbatasan SDM.
- Terkait dengan adanya pengembangan Jabatan Fungsional masih banyak aparatur di daerah yang belum tertarik mengambil jabatan fungsional sebagai alternative pengembangan karirnya.

c). Pengembangan dan Disiplin Aparatur

- Penyusunan standar pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja aparatur ternyata menimbulkan permasalahan, yakni banyaknya pegawai yang berlomba-lomba melanjutkan studi S1, S2, bahkan S3. Hanya saja pendidikan yang diambil sering tidak mendukung tugas, pokok dan fungsi tempat dimana dia berkerja.
- Masih terjadi *overlapping* penyelenggaraan diklat antara BKPPD dengan SKPD Teknis
- Penegakan disiplin dan etika melalui proses internal antar staf, apel pagi rutin, dan absensi harian masih belum efektif.

d). Isu Keuangan Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun revitalisasi kebijakan desentralisasi terjabar di dalam berbagai rumusan yang diantaranya adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional. Dalam hal ini tampak bahwa keterkaitan antara arah kebijakan desentralisasi di bidang keuangan daerah dengan sinkronisasi peraturan perundangan, penguatan kelembagaan, kejelasan tentang pembagian urusan, serta unsur-unsur kebijakan jangka menengah lainnya.

Selanjutnya, kebijakan di bidang keuangan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan yang baik.

Ada tiga isu dan permasalahan dalam mencapai sasaran tersebut, yaitu:

- Perlunya Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan, termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi;
- Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara profesional;
- Pengembangan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

11. Demokratisasi

Sejalan dengan semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep desentralisasi ini belum berjalan dengan optimal. Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakoptimalan konsep desentralisasi ini. Salah satu penyebab utama adalah belum dipahaminya jiwa dari UU tersebut secara

utuh. Selain itu, penerbitan UU tersebut belum diikuti dan ditindaklanjuti dengan dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Nilai demokrasi yang berjalan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat terlihat jelas sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah tersebut. Pemilihan Umum baik pemilihan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung menjadi Indikator nyata berjalannya nilai-nilai demokrasi. Selain itu masyarakat juga dituntut dapat memahami dan menjaga nilai-nilai tersebut mulai dari ruang lingkup terkecil yakni rumah tangga sampai dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan juga muncul ketika persepsi mengenai Otonomi Daerah dan demokratisasi antara *stakeholder* masih belum sejalan. Perbedaan persepsi bukan hanya muncul antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, tetapi juga terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perbedaan persepsi terutama muncul pada pembagian urusan yang menjadi kewewenangan masing-masing. Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan, maka timbul Isu mengenai pentingnya demokratisasi pembangunan antar-*stakeholder* pada setiap lini pemerintahan. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik akan menghasilkan sebuah sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi *over lapping* maupun *double funding* (rangkap pembiayaan).

12. Kemandirian Masyarakat

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat maka kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan kehidupan masyarakat menjadi harga mutlak. Hal tersebut merupakan filosofi dari kemerdekaan itu sendiri. Tidak ada campur tangan asing atau intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun kemandirian masyarakat tersebut dapat dimulai dengan hal-hal kecil yang bersifat personal dan lingkungan. Mulai dari merencanakan pembangunan di sekitar lingkungan sampai pada mengalokasikan anggaran

pembangunan sendiri, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai stimulator. Memberi pencerahan tentang kemandirian dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.

Paradigma pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat dapat menjadi langkah awal kemandirian itu sendiri. Dimana masyarakat harus menyadari tentang tanggung jawab yang diemban bersama dengan pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.